

Kajian Historis Pembentukan Khalifah di Massa Abubakar As-Siddiq

***¹Jufri Yusup, ²Ansar Tohe**

^{1,2}Institut Agama Islam Negeri Ternate, Indonesia

email: *¹jufri.yusufzed25@gmail.com, ²ansartohe7@gmail.com

Abstract

This study examines the formation of the caliphate during the leadership transition following the death of Prophet Muhammad SAW, with a particular focus on the appointment of Abu Bakr Ash-Shiddiq as the first caliph of Islam. The research aims to analyze the concept of the caliphate, the process of Abu Bakr's appointment through deliberation (*shūrā*) at Saqifah Bani Sa'idah, and the implications of his leadership for the development of the Islamic political system. This study employs a qualitative library research method using a historical and descriptive-analytical approach. Data were collected from primary sources, including the Qur'an, Hadith, and classical Islamic historical works, as well as secondary sources such as scholarly books and journal articles. The findings reveal that the appointment of Abu Bakr was based on consultation and collective consensus rather than hereditary succession, reflecting the principles of justice, trustworthiness, and public welfare. Furthermore, Abu Bakr's leadership successfully maintained the unity of the Muslim community, suppressed the Ridda movements, enforced zakat obligations, and established the administrative and political foundations of the Khulafaur Rashidin government, demonstrating that effective leadership is rooted in integrity, consultation, and commitment to the common good.

Keywords: *Caliphate, Abu Bakr Ash-Shiddiq, Shura, Islamic Leadership, Khulafaur Rashidin*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis pembentukan khalifah pada masa Abu Bakar Ash-Shiddiq setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, dengan menelaah konsep khalifah, proses pengangkatannya melalui musyawarah di Saqifah Bani Sa'idah, serta implikasi kepemimpinannya terhadap sistem pemerintahan Islam. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) melalui pendekatan sejarah dan deskriptif-analitis. Data diperoleh dari sumber primer berupa Al-Qur'an, hadis, dan literatur sejarah Islam klasik, serta sumber sekunder berupa buku dan artikel ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengangkatan Abu Bakar Ash-Shiddiq sebagai khalifah pertama tidak didasarkan pada sistem pewarisan kekuasaan, melainkan melalui mekanisme *syūrā* yang menghasilkan legitimasi politik berdasarkan kesepakatan para sahabat. Kepemimpinannya berhasil menjaga persatuan umat Islam, mengatasi gerakan *riddah*, menegakkan kewajiban zakat, serta membangun fondasi pemerintahan Khulafaur Rasyidin yang berlandaskan prinsip keadilan, amanah, musyawarah, dan kemaslahatan umat. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan transisi kepemimpinan Islam pada masa awal sangat ditentukan oleh integritas pemimpin dan penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan bersama.

Kata Kunci: *Khalifah, Abu Bakar Ash-Shiddiq, Syūrā, Kepemimpinan Islam, Khulafaur Rasyidin*

PENDAHULUAN

Wafatnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 632 M merupakan salah satu peristiwa yang paling menentukan dalam sejarah Islam karena menandai berakhirnya masa kenabian sekaligus membuka babak baru dalam sistem kepemimpinan umat Islam. Selama masa kerasulannya, Nabi Muhammad SAW tidak hanya berperan sebagai penyampai wahyu, tetapi juga sebagai pemimpin agama, kepala pemerintahan, hakim, dan pemimpin militer yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, wafatnya Nabi menimbulkan kekosongan kepemimpinan yang berpotensi memunculkan perpecahan apabila tidak segera diselesaikan melalui mekanisme yang dapat diterima oleh seluruh umat Islam.¹

Kondisi tersebut mendorong para sahabat untuk segera bermusyawarah dalam menentukan pemimpin yang akan melanjutkan tugas-tugas pemerintahan dan menjaga persatuan umat. Pertemuan yang berlangsung di Saqifah Bani Sa'idah menjadi tonggak sejarah penting dalam proses pembentukan sistem pemerintahan Islam. Dalam forum tersebut, kaum Muhajirin dan Ansar mengemukakan pandangan masing-masing mengenai figur yang paling layak menjadi pemimpin umat. Perbedaan pendapat tersebut menunjukkan bahwa persoalan kepemimpinan setelah wafatnya Nabi merupakan persoalan yang sangat krusial karena menyangkut keberlangsungan dakwah Islam, stabilitas politik, dan ketertiban sosial masyarakat Madinah.²

Melalui proses musyawarah yang berlangsung secara dinamis, para sahabat akhirnya mencapai kesepakatan untuk membaiat Abu Bakar Ash-Shiddiq sebagai khalifah pertama umat Islam. Pemilihan Abu Bakar didasarkan pada berbagai pertimbangan, di antaranya kedekatan beliau dengan Rasulullah

¹ Azyumardi Azra, *Sejarah Peradaban Islam: Dari Masa Klasik hingga Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2020), 45-47.

² Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam Dirasah Islamiyah II* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020), 35-39; Samsul Munir Amin, *Sejarah Peradaban Islam* (Jakarta: Amzah, 2021), 72-75.

SAW, pengalaman dalam mendampingi perjuangan dakwah Islam, kemampuan memimpin masyarakat, serta penerimaan yang luas di kalangan Muhajirin maupun Ansar. Kesepakatan tersebut mencerminkan bahwa legitimasi kepemimpinan dalam Islam pada masa awal dibangun atas dasar musyawarah (syūrā), kemaslahatan umat, dan kesepakatan bersama, bukan berdasarkan sistem pewarisan kekuasaan.³

Pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah memiliki arti yang sangat strategis bagi kelangsungan negara Islam yang baru terbentuk. Pada awal masa pemerintahannya, Abu Bakar menghadapi berbagai tantangan, seperti munculnya gerakan riddah (kemurtadan), nabi-nabi palsu, serta penolakan sebagian kabilah Arab untuk membayar zakat. Berbagai persoalan tersebut mengancam persatuan umat Islam dan keberlangsungan pemerintahan. Melalui kebijakan yang tegas dan kepemimpinan yang kuat, Abu Bakar berhasil mempertahankan keutuhan negara Islam sekaligus mengembalikan stabilitas politik dan sosial masyarakat. Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa proses pembentukan khalifah tidak hanya berkaitan dengan pergantian pemimpin, tetapi juga menjadi fondasi bagi keberlangsungan sistem pemerintahan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin.⁴

Meskipun proses pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah telah banyak dibahas dalam literatur sejarah Islam, sebagian kajian masih berfokus pada kronologi peristiwa dan belum mengkaji secara mendalam dinamika musyawarah, legitimasi politik, serta nilai-nilai kepemimpinan Islam yang melandasi proses tersebut. Padahal, pemahaman terhadap proses pembentukan khalifah memiliki relevansi yang tinggi dalam pengembangan kajian politik Islam, terutama dalam menjelaskan konsep kepemimpinan yang

³ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021), 35-40; Philip K. Hitti, *History of the Arabs*, 10th ed. (New York: Palgrave Macmillan, 2002), 139-142.

⁴ Marshall G. S. Hodgson, *The Venture of Islam: Conscience and History in a World Civilization*, Vol. 1 (Chicago: The University of Chicago Press, 1974), 191-196; Ira M. Lapidus, *A History of Islamic Societies*, 3rd ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 2014), 34-37.

mengedepankan musyawarah, persatuan, keadilan, dan tanggung jawab. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting sebagai upaya memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai proses pembentukan khalifah pada masa Abu Bakar Ash-Shiddiq serta relevansinya terhadap konsep kepemimpinan Islam kontemporer.⁵

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pembentukan khalifah pada masa Abu Bakar Ash-Shiddiq, mengkaji faktor-faktor yang melatarbelakangi pengangkatannya sebagai khalifah pertama, serta menjelaskan nilai-nilai kepemimpinan Islam yang tercermin dalam proses musyawarah di Saqifah Bani Sa'idah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian sejarah peradaban Islam dan politik Islam, sekaligus menjadi referensi akademik dalam memahami konsep kepemimpinan yang berlandaskan prinsip syura, persatuan, dan kemaslahatan umat.⁶

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian difokuskan pada pengkajian berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan proses pembentukan khalifah pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sejarah (*historical approach*) untuk menelusuri kronologi peristiwa, dinamika politik, serta proses musyawarah yang melahirkan sistem kekhalifahan pertama dalam sejarah Islam. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis guna menjelaskan fakta-fakta sejarah secara sistematis sekaligus menganalisis nilai-nilai kepemimpinan yang terkandung dalam proses pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah.

⁵ Hugh Kennedy, *The Prophet and the Age of the Caliphates: The Islamic Near East from the Sixth to the Eleventh Century*, 3rd ed. (London: Routledge, 2016), 52-59; Azyumardi Azra, *Sejarah Peradaban Islam*, 48-50.

⁶ Samsul Munir Amin, *Sejarah Peradaban Islam* (Jakarta: Amzah, 2021), 76-80; Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021), 40-45.

Penelitian dilaksanakan selama proses penyusunan artikel pada tahun 2026. Penelitian tidak dilakukan di lokasi tertentu karena merupakan penelitian kepustakaan. Seluruh proses pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran berbagai sumber ilmiah, baik dalam bentuk buku, artikel jurnal, prosiding, maupun dokumen akademik yang relevan dan dapat diakses melalui perpustakaan maupun pangkalan data ilmiah daring.

Data penelitian terdiri atas sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer meliputi Al-Qur'an, hadis, serta karya-karya sejarah Islam klasik yang membahas peristiwa Saqifah Bani Sa'idah dan masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Sementara itu, sumber sekunder berupa buku-buku sejarah peradaban Islam, politik Islam, ensiklopedia, artikel jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang membahas kepemimpinan Islam dan Khulafaur Rasyidin.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelusuri, mengidentifikasi, membaca, dan mengkaji berbagai literatur yang berkaitan dengan fokus penelitian. Literatur yang diperoleh kemudian diseleksi berdasarkan relevansi, kredibilitas penulis, kebaruan publikasi, dan keterkaitannya dengan tema pembentukan khalifah pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Data yang telah terkumpul selanjutnya diklasifikasikan sesuai dengan pokok bahasan penelitian sehingga memudahkan proses analisis.

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui beberapa tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi, peneliti menyeleksi informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data disusun secara sistematis berdasarkan kronologi peristiwa dan tema-tema pembahasan, seperti proses musyawarah di Saqifah Bani Sa'idah, faktor-faktor yang melatarbelakangi terpilihnya Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah, serta legitimasi kepemimpinannya. Tahap terakhir dilakukan dengan menginterpretasikan hasil analisis untuk memperoleh pemahaman yang

komprehensif mengenai proses pembentukan khalifah serta nilai-nilai kepemimpinan Islam yang terkandung di dalamnya.

Keabsahan data dijaga melalui teknik triangulasi sumber dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai referensi, baik sumber primer maupun sumber sekunder. Perbandingan tersebut dilakukan untuk memastikan konsistensi data, mengurangi subjektivitas penafsiran, serta menghasilkan deskripsi sejarah yang lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Khalifah sebagai Dasar Kepemimpinan Islam

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep khalifah dalam Islam tidak hanya dimaknai sebagai pemimpin administratif, tetapi juga sebagai pemegang amanah untuk menjaga agama dan mengatur kehidupan masyarakat berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Temuan ini memperkuat pandangan Azyumardi Azra yang menyatakan bahwa konsep khalifah mengandung dimensi spiritual, moral, dan politik secara bersamaan.⁷ Dengan demikian, legitimasi seorang khalifah tidak hanya ditentukan oleh kekuasaan politik, tetapi juga oleh integritas moral dan tanggung jawab dalam mewujudkan kemaslahatan umat. Temuan ini sejalan dengan penelitian Rahmat Hidayat yang menjelaskan bahwa kepemimpinan khalifah merupakan bentuk implementasi nilai-nilai keadilan (*al-'adl*), amanah (*al-amānah*), dan musyawarah (*syūrā*) dalam sistem pemerintahan Islam.⁸ Artinya, konsep khalifah merupakan bentuk kepemimpinan yang menyeimbangkan aspek keagamaan dan tata kelola pemerintahan sehingga berbeda dengan sistem monarki yang bertumpu pada pewarisan kekuasaan.

⁷ Azyumardi Azra, *Sejarah Peradaban Islam* (Jakarta: Kencana, 2021), 45-48.

⁸ Rahmat Hidayat, "Konsep Kepemimpinan Khalifah dalam Perspektif Sejarah Peradaban Islam," *Jurnal Studi Peradaban Islam* 5, no. 1 (2023): 61-72.

2. Musyawarah sebagai Mekanisme Legitimasi Politik

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa pengangkatan Abu Bakar Ash-Shiddiq melalui musyawarah di Saqifah Bani Sa'idah merupakan bentuk legitimasi politik yang lahir dari kesepakatan para sahabat. Pada awal musyawarah terdapat perbedaan pandangan antara kaum Ansar dan Muhajirin mengenai figur yang paling layak memimpin umat Islam. Namun, perbedaan tersebut berhasil diselesaikan melalui dialog dan pertimbangan kemaslahatan bersama sehingga menghasilkan keputusan yang diterima seluruh kelompok.⁹ Hasil ini mendukung penelitian Ahmad Yani yang menyatakan bahwa proses baiat Abu Bakar merupakan praktik demokrasi deliberatif dalam konteks politik Islam awal.¹⁰ Berbeda dengan sistem suksesi yang didasarkan pada garis keturunan, pemilihan Abu Bakar didasarkan pada kapasitas kepemimpinan, kedekatan dengan Rasulullah SAW, pengalaman dakwah, dan penerimaan sosial di kalangan umat Islam. Analisis ini juga memperlihatkan bahwa mekanisme *syūrā* menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas politik pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, temuan penelitian ini memperkuat teori politik Islam yang menempatkan musyawarah sebagai prinsip utama dalam pengambilan keputusan publik.¹¹

3. Kepemimpinan Abu Bakar dalam Menjaga Stabilitas Negara

Analisis hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan terbesar yang dihadapi Abu Bakar setelah diangkat menjadi khalifah adalah munculnya gerakan *riddah*, nabi-nabi palsu, dan penolakan pembayaran zakat oleh beberapa kabilah Arab. Kondisi tersebut berpotensi mengancam eksistensi negara Islam yang baru terbentuk.¹² Data penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Perang Riddah yang dilakukan Abu Bakar bukan semata-mata tindakan militer, tetapi

⁹ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021), 45-49.

¹⁰ Ahmad Yani, "Khulafah Al-Rasyidun: Menelaah Kepemimpinan Abu Bakar Al-Shiddiq," *CARITA: Jurnal Sejarah dan Budaya* 1, no. 1 (2022): 34-48.

¹¹ Abdul Karim, *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam* (Yogyakarta: Bagaskara, 2020), 102-106.

¹² Ishak, "Dinamika Penyebaran Islam pada Masa Abu Bakar Ash-Shiddiq dan Tantangan yang Dihadapi," *Jurnal Edusociety* 12, no. 1 (2025): 33-50.

merupakan strategi politik untuk mempertahankan legitimasi negara dan menjaga kesatuan umat. Temuan ini sejalan dengan penelitian Misrayanti yang menjelaskan bahwa ketegasan Abu Bakar menjadi faktor utama dalam mengembalikan stabilitas politik Islam pada masa awal kekhalifahan.¹³

Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa keberhasilan Abu Bakar mempertahankan kewajiban zakat memiliki dampak yang sangat besar terhadap keberlangsungan sistem pemerintahan Islam. Zakat bukan hanya dipahami sebagai ibadah individual, tetapi juga sebagai instrumen fiskal negara yang menopang kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penolakan membayar zakat dipandang sebagai bentuk pembangkangan terhadap otoritas negara sehingga perlu ditindak secara tegas.¹⁴

4. Implikasi Kepemimpinan Abu Bakar terhadap Sistem Pemerintahan Islam

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan Abu Bakar menjadi fondasi bagi terbentuknya sistem pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Prinsip-prinsip yang diterapkan Abu Bakar, seperti keadilan, amanah, kesederhanaan, dan musyawarah, kemudian menjadi model kepemimpinan yang diteruskan oleh Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib.¹⁵ Temuan ini mendukung hasil penelitian Zaniha dkk. yang menyatakan bahwa nilai universal politik Islam pada masa Abu Bakar terletak pada keberhasilannya membangun legitimasi pemerintahan melalui konsensus sosial, bukan melalui dominasi kekuasaan.¹⁶ Dengan demikian, kepemimpinan Abu Bakar

¹³ Misrayanti, "Kepemimpinan Abu Bakar Al-Shiddiq (Simbol Pemersatu Umat Islam)," *Jurnal Rihlah* 9, no. 1 (2023): 77-89.

¹⁴ Mulyani, "Peran Abu Bakar Ash-Shiddiq dalam Membangun Stabilitas Politik dan Agama Islam," *Jurnal Al-Zayn* 3, no. 1 (2026): 12-29.

¹⁵ Siti Maryam dkk., *Sejarah Peradaban Islam dari Masa Klasik hingga Kontemporer* (Yogyakarta: LESFI, 2022), 150-154.

¹⁶ Zaniha, M., W. Ramadhani, K. Aswal, dan Kurniati, "Nilai-Nilai Universal Politik Islam dalam Suksesi Kepemimpinan Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq," *Tumanurung: Jurnal Sejarah dan Budaya* 5, no. 1 (2025): 12-25.

menunjukkan bahwa stabilitas negara lebih ditentukan oleh kualitas kepemimpinan daripada kekuatan militer semata.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan khalifah pada masa Abu Bakar Ash-Shiddiq merupakan titik awal terbentuknya sistem pemerintahan Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Proses pengangkatannya tidak didasarkan pada sistem pewarisan kekuasaan, melainkan melalui mekanisme musyawarah (*syūrā*) yang melibatkan tokoh-tokoh Muhajirin dan Ansar di Saqifah Bani Sa'idah. Mekanisme tersebut menghasilkan legitimasi politik yang diterima oleh mayoritas umat Islam serta mencerminkan nilai-nilai demokratis dalam tradisi politik Islam awal. Temuan ini menegaskan bahwa konsep khalifah tidak hanya mengandung dimensi politik, tetapi juga dimensi moral, spiritual, dan sosial yang menempatkan pemimpin sebagai pemegang amanah untuk menjaga agama, menegakkan keadilan, serta mewujudkan kemaslahatan umat.

Penelitian ini juga menemukan bahwa keberhasilan kepemimpinan Abu Bakar Ash-Shiddiq sangat dipengaruhi oleh ketegasan, integritas, dan komitmennya dalam mempertahankan persatuan umat Islam. Kebijakan menghadapi gerakan *riddah*, penolakan pembayaran zakat, serta upaya menjaga stabilitas pemerintahan menunjukkan bahwa kepemimpinan Abu Bakar tidak hanya berorientasi pada penyelesaian konflik jangka pendek, tetapi juga meletakkan fondasi yang kokoh bagi berkembangnya sistem pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Dengan demikian, tujuan penelitian untuk menganalisis proses pembentukan khalifah, faktor-faktor yang melatarbelakangi pengangkatan Abu Bakar, serta implikasinya terhadap sistem pemerintahan Islam telah tercapai.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan agar penelitian selanjutnya mengembangkan kajian mengenai sistem suksesi

kepemimpinan Islam melalui pendekatan komparatif antara masa Khulafaur Rasyidin, Dinasti Umayyah, Dinasti Abbasiyah, dan sistem pemerintahan Islam kontemporer. Selain itu, penelitian mendatang diharapkan memanfaatkan sumber-sumber sejarah primer yang lebih beragam serta pendekatan historiografi modern untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika politik Islam, proses legitimasi kekuasaan, dan relevansi prinsip *syūrā* dalam praktik pemerintahan pada era modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Azyumardi Azra, *Sejarah Peradaban Islam: Dari Masa Klasik hingga Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2020), 45-47.
- Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam Dirasah Islamiyah II* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020), 35-39; Samsul Munir Amin, *Sejarah Peradaban Islam* (Jakarta: Amzah, 2021), 72-75.
- Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021), 35-40; Philip K. Hitti, *History of the Arabs*, 10th ed. (New York: Palgrave Macmillan, 2002), 139-142.
- Marshall G. S. Hodgson, *The Venture of Islam: Conscience and History in a World Civilization*, Vol. 1 (Chicago: The University of Chicago Press, 1974), 191-196; Ira M. Lapidus, *A History of Islamic Societies*, 3rd ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 2014), 34-37.
- Hugh Kennedy, *The Prophet and the Age of the Caliphates: The Islamic Near East from the Sixth to the Eleventh Century*, 3rd ed. (London: Routledge, 2016), 52-59; Azyumardi Azra, *Sejarah Peradaban Islam*, 48-50.
- Samsul Munir Amin, *Sejarah Peradaban Islam* (Jakarta: Amzah, 2021), 76-80; Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021), 40-45.
- Azyumardi Azra, *Sejarah Peradaban Islam* (Jakarta: Kencana, 2021), 45-48.
- Rahmat Hidayat, "Konsep Kepemimpinan Khalifah dalam Perspektif Sejarah Peradaban Islam," *Jurnal Studi Peradaban Islam* 5, no. 1 (2023): 61-72.
- Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021), 45-49.
- Ahmad Yani, "Khulafah Al-Rasyidun: Menelaah Kepemimpinan Abu Bakar Al-Shiddiq," *CARITA: Jurnal Sejarah dan Budaya* 1, no. 1 (2022): 34-48.
- Abdul Karim, *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam* (Yogyakarta: Bagaskara, 2020), 102-106.
- Ishak, "Dinamika Penyebaran Islam pada Masa Abu Bakar Ash-Shiddiq dan Tantangan yang Dihadapi," *Jurnal Edusociety* 12, no. 1 (2025): 33-50.



- Misrayanti, "Kepemimpinan Abu Bakar Al-Shiddiq (Simbol Pemersatu Umat Islam)," *Jurnal Rihlah* 9, no. 1 (2023): 77-89.
- Mulyani, "Peran Abu Bakar Ash-Shiddiq dalam Membangun Stabilitas Politik dan Agama Islam," *Jurnal Al-Zayn* 3, no. 1 (2026): 12-29.
- Siti Maryam dkk., *Sejarah Peradaban Islam dari Masa Klasik hingga Kontemporer* (Yogyakarta: LESFI, 2022), 150-154.
- Zanilha, M., W. Ramadhani, K. Aswal, dan Kurniati, "Nilai-Nilai Universal Politik Islam dalam Suksesi Kepemimpinan Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq," *Tumanurung: Jurnal Sejarah dan Budaya* 5, no. 1 (2025): 12-25.